

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PELAKU PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (CURAT) KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus Wilayah Polres Tanggamus)

**Oleh
Dayu Apriliyani**

Salah satu jenis tindak pidana yang paling sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, yang tidak hanya merugikan individu tetapi juga menciptakan rasa ketidakamanan di lingkungan, adalah pencurian kendaraan bermotor. Tindak pidana pencurian ini dapat melibatkan unsur pemberatan, yang menjelaskan bahwa pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau keadaan tertentu. Pasal 363 KUHP menyatakan bahwa pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, tergantung pada beratnya tindakan yang dilakukan. Permasalahan penelitian: Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Tanggamus dalam menangani kasus pencurian dengan pemberatan kendaraan bermotor. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan kendaraan bermotor di wilayah Polres Tanggamus.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan narasumber, dan sumber data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah Kasat Reskrim Polres Tanggamus, Penyidik Reskrim Polres Tanggamus, Humas Polres Tanggamus dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pengolahan data diperoleh dengan cara identifikasi data, klasifikasi data, dan sistematisasi data. Sedangkan analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Bersasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukan: Polres Tanggamus telah melakukan upaya signifikan dalam menangani kasus ini melalui proses penyelidikan, penangkapan, dan penerapan sanksi hukum sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa faktor penghambat, seperti keterbatasan sumber daya, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan praktik kolusi di dalam aparat penegak hukum.

Dayu Apriliyani

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun tantangan masih ada, upaya Polres Tanggamus dalam penegakan hukum pencurian dengan pemberatan cukup efektif. Namun, diperlukan penguatan sistem dan kerjasama lintas sektor untuk mengoptimalkan hasil yang dicapai.

Saran penelitian ini adalah: (1) Polres perlu meningkatkan kapasitas aparat melalui pelatihan dan investasi dalam teknologi modern, seperti sistem pemantauan CCTV, untuk mendukung penyelidikan dan penegakan hukum. Selanjutnya, membangun sistem pengawasan internal yang ketat dan menyediakan mekanisme pengaduan bagi masyarakat untuk mencegah kolusi. (2) Membangun kerjasama dengan masyarakat dan melaksanakan program edukasi hukum serta kampanye kesadaran hukum untuk meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban hukum.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak pidana Pencurian, Pencurian Dengan Pemberatan.

ABSTRACT

LAW ENFORCEMENT AGAINST THE CRIME OF MOTOR VEHICLE THEFT WITH AGGRAVATION (CURAT) (Case Study of Polres Tanggamus Region)

**By
Dayu Apriliyani**

One of the most common types of crimes occurring in society, which not only harms individuals but also creates a sense of insecurity in the community, is motor vehicle theft. This crime can involve aggravating factors, indicating that the theft is committed in certain ways or under specific circumstances. Article 363 of the Criminal Code states that offenders can be sentenced to a maximum of 7 (seven) years in prison, depending on the severity of the actions committed. The research questions are: Tanggamus Police enforce the law in handling cases of aggravated motor vehicle theft. factors hinder law enforcement efforts against aggravated motor vehicle theft in the Tanggamus Police jurisdiction.

The research approach used is a normative juridical approach supported by an empirical juridical approach. The data sources include primary data obtained directly through interviews with informants and secondary data obtained through literature studies. The informants in this study are the Head of Criminal Investigation Unit of Tanggamus Police, Criminal Investigators of Tanggamus Police, Public Relations of Tanggamus Police, and lecturers from the Criminal Law Department of the Faculty of Law at the University of Lampung. Data processing is conducted through data identification, classification, and systematization. Data analysis uses qualitative analysis.

Based on the research findings and discussions, it shows that the Tanggamus Police have made significant efforts in handling this case through investigation, arrests, and the application of legal sanctions in accordance with the Criminal Code. However, this study also identifies several hindering factors, such as limited resources, low public legal awareness, and collusion practices within law enforcement agencies. Overall, the study concludes that despite existing challenges, the Tanggamus Police's efforts in enforcing the law against aggravated theft are quite effective. However, strengthening systems and cross-sector collaboration is needed to optimize the results achieved.

Dayu Apriliyani

The recommendations from this research are: (1) The Tanggamus Police should enhance the capacity of their personnel through training and investment in modern technology, such as CCTV monitoring systems, to support investigations and law enforcement. Furthermore, they should establish a strict internal oversight system and provide a complaint mechanism for the public to prevent collusion. (2) Build cooperation with the community and implement legal education programs and awareness campaigns to improve understanding of legal rights and obligations.

Keywords: Law Enforcement, Theft, Theft with Aggravation.